

Disdukcapil dan Transnaker Bombana Perkuat Integrasi Data Pencari Kerja dan Jamsostek

Bombana, Sultranet.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Bombana kembali menjalin kerja sama strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data pencari kerja (Pencaker) serta peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilaksanakan di Kantor Disdukcapil Bombana pada Senin, 23 Juni 2025. Hadir langsung Kepala Disdukcapil, Firdaus, S.Pd., MM., dan Kepala Dinas Transnaker, Drs. Alimuddin.

Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan pemanfaatan data kependudukan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, melalui Surat Nomor: 400.8.1.2/1191/Dukcapil. Dasar hukum kerja sama ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses data kependudukan dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang sistem manajemen keamanan informasi kependudukan.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menegaskan bahwa sinkronisasi data sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis data yang valid.

“Melalui sinkronisasi dan validasi data by name by address lewat Webportal Dukcapil, pencari kerja dapat teridentifikasi secara sah dan tepat sasaran. Ini bagian dari upaya digitalisasi dan perlindungan data masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Transnaker, Drs. Alimuddin, menyampaikan bahwa validasi data pencari kerja sangat krusial dalam penyaluran program ketenagakerjaan, khususnya untuk peserta Jamsostek.

“Kolaborasi ini memperkuat basis data agar lebih akurat dan adil. Dengan mengintegrasikan data Pencaker dengan data kependudukan dari Disdukcapil, kami dapat memastikan validitas data dalam pelayanan tenaga kerja,” ujarnya.

Menurut Alimuddin, data yang akurat akan mempermudah proses pemetaan pencari kerja, penyaluran informasi lowongan, dan distribusi bantuan jaminan

sosial, terutama bagi pekerja sektor informal dan rentan.

Langkah awal dari kerja sama ini dimulai dengan pepadanan data pencari kerja dalam aplikasi SISNAKER milik Transnaker dengan database kependudukan dari Disdukcapil. Setelah itu, data akan diintegrasikan dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan.

Firdaus menambahkan bahwa pihaknya siap menyediakan data NIK dan elemen kependudukan sebagai dasar verifikasi keabsahan identitas para pencari kerja.

“Data yang akurat dan sinkron antarinstansi akan sangat membantu dalam mendukung program ketenagakerjaan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Pekerja, memperluas cakupan peserta Jamsostek, serta menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih responsif dan akuntabel.

Dengan integrasi data yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menciptakan sistem pelayanan ketenagakerjaan yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat pekerja.

Yayasan Politeknik Bombana Tunggak Gaji Dosen Sampai 25 Bulan, Nasib Ratusan Mahasiswa Terancam!

Sultranet.com, Rumbia - Puluhan dosen dan staf Politeknik Bombana kembali menghadapi keterlambatan pembayaran gaji yang belum terselesaikan sejak Januari 2025. Masalah ini bukan kali pertama terjadi, tetapi telah berulang setiap tahunnya tanpa solusi yang jelas. Kondisi ini membuat para tenaga pendidik dan pegawai kampus menggelar aksi protes di halaman kampus menuntut hak mereka. Jumat (21/3)

Dampak dari ketidakpastian ini dikhawatirkan akan berdampak pada proses perkuliahan yang ada di Yayasan dimana mantan Bupati Bombana dua periode H. Tafdil menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan itu menjadi tidak efektif yang pada akhirnya dapat mengancam nasib ratusan mahasiswa yang berkuliah di kampus itu.

Seorang dosen yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa berbagai upaya komunikasi telah dilakukan dengan pihak yayasan dan direktorat kampus, tetapi tidak membuahkan hasil konkret.

“Kami sudah mencoba berdialog, tapi hasilnya nihil. Mereka selalu beralasan bahwa dana dari pemerintah daerah belum cair, padahal sebagai yayasan, seharusnya mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap gaji dosen dan staf,” ujarnya.

Keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi selama dua hingga tiga bulan bahkan disebut telah mencapai akumulasi hingga 25 bulan bagi beberapa dosen.

Kondisi ini membuat banyak tenaga pendidik mengalami kesulitan finansial. Beberapa di antaranya terpaksa berutang atau menjual aset pribadi demi memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami bekerja secara profesional, tetapi hak kami tidak diberikan tepat waktu. Bagaimana kami bisa bertahan jika setiap tahun harus menghadapi masalah yang sama?” ujarnya.

Tak hanya itu, para dosen juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan kampus. Mereka menilai tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana, sementara setiap kali meminta kejelasan, pihak yayasan selalu berdalih bahwa anggaran telah habis.

Dalam aksi protes ini, para dosen dan staf menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak yayasan, yakni pembayaran penuh atas seluruh gaji yang tertunggak, pembayaran semua tunjangan dosen dan jabatan sesuai hak mereka, serta pengalihan status kampus dari swasta ke negeri agar sistem keuangan lebih stabil dan tidak lagi terjadi penyimpangan anggaran.

Menanggapi permasalahan ini, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, meminta pihak yayasan untuk segera

menyelesaikan kewajiban mereka terhadap para dosen agar tidak menyebabkan proses pendidikan ratusan mahasiswa terganggu.

“Bahkan ada honorer yang resign beberapa tahun lalu dan karena tidak menerima upahnya. Padahal Sudah puluhan miliar yang masuk ke Politeknik itu, tapi mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik. Setiap tahunnya hampir lima miliar diinjeksikan Pemkab Bombana ke Politeknik itu, bagaimana proses manajemennya sehingga 25 bulan dosen tidak terbayar dan karyawan ataupun staf yang telah resign beberapa tahun lalu juga belum dibayar gajinya?” tegas Yudi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yayasan terkait tuntutan para dosen dan staf. Sementara itu, ketidakpastian mengenai pembayaran gaji masih terus berlanjut, mengancam keberlangsungan pendidikan di Politeknik Bombana.

Pewartu : Idris Hayang